



---

**KONFRONTASI KEBERPIHAKAN PADA KOMENTAR MEDIA DIGITAL DAN RAGAM  
IDEOLOGICAL STATE APPARATUS**

Pidekso Adi\*

*Universitas Negeri Malang*

*Jl. Joyotamansari I RT.1 RW.6 No.39, Clumprit Merjosari, Malang, Jawa Timur, Indonesia*

---

**ARTICLE INFO**

*Article history:*

Received: 30-10-2024

Accepted: 30-10-2024

Published: 26-12-2024

*Keyword: ideological  
state apparatus,  
confrontation of  
partisanship, digital  
media*

**Kata Kunci:** aparatus  
negara ideologis,  
konfrontasi  
keberpihakan, media  
digital

---

**ABSTRACT**

*Mass media creates open-ended events, allowing readers to interpret them widely. The media can also be used by the government as a means of public control through ideological state apparatus mechanisms. Critical discourse analysis of media reader comments reflects the psychological and social conditions of society, while structural analysis and semantic networks reinforce the picture of expression. Propositional and content relationships in the comments show pro, con or neutral tendencies, with more balanced responses on sacred issues, but tend to be pessimistic about government policies or campaign promises, and show attempts at ideological control on sensitive issues.*

Media massa menciptakan peristiwa yang bersifat *open-ended*, memungkinkan pembaca untuk menafsirkannya secara luas. Media juga dapat digunakan pemerintah sebagai alat kontrol publik melalui mekanisme aparatus negara ideologis. Analisis wacana kritis terhadap komentar pembaca media mencerminkan kondisi psikologis dan sosial masyarakat, sementara analisis struktural dan jaringan semantik memperkuat gambaran ekspresi tersebut. Hubungan proposisi dan konten dalam komentar menunjukkan kecenderungan pro, kontra, atau netral, dengan respon yang lebih seimbang pada isu sakral. Namun kecenderungan pesimistis terhadap kebijakan pemerintah atau janji kampanye, serta menunjukkan upaya kontrol ideologi pada isu sensitif.

---

\* Penulis korespondensi.

Alamat E-mail: [pidekso.adi.fs@um.ac.id](mailto:pidekso.adi.fs@um.ac.id) (Pidekso Adi)

ISSN: 2579-3799 (Online) - BASINDO: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra Indonesia, dan Pembelajarannya is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

## PENDAHULUAN

Setiap peristiwa yang diekspresikan dalam media massa, khususnya media digital, menjadi peristiwa yang bersifat *open-ended*. Siapapun yang membaca dan memahaminya dengan lebih dalam memiliki ruang yang lebih luas. Tingkat resepsi materi pembaca terhadap konten yang dibagikan menjadi bagian dari dialektika yang terjadi di media massa tersebut. Dialektika itu bisa berdistribusi kepada kajian multidisipliner. Pada saat inilah analisis kritis terhadap bentuk-bentuk dialektika menjadi terbangun dengan sendirinya. Tentunya tingkat kerumitan kekritisannya menjadi bergradasi sesuai dengan latar belakang pembaca sebagai penanggap, pengapresiasi, penikmat, dan penilai yang berbeda-beda (Jausz dalam Verma, 2013:261). Keterampilan berpikir kreatif dan kritis merupakan kemampuan yang terkadang dapat digunakan secara bergantian dalam definisinya. Faktanya, mereka mempunyai konstruksi yang berbeda karena mereka membedakan hasil dari perilaku manusia. Salah satu persyaratan saat ini adalah bahwa individu harus mendekati masalah sehari-hari dengan menggunakan kedua kompetensi tersebut. Jadi, salah satu alat yang bermanfaat untuk pengembangan kreativitas dan keterampilan berpikir kritis yang diusulkan adalah lingkungan pembelajaran berbasis masalah di kelas (Birgili, 2015: 71)

Dengan melihat kembali kajian tentang penelitian dengan metode AWK (Analisis Wacana Kritis), maka terdapat dua tujuan yang akan dicapai. Tujuan pertama mengenai demisifikasi wacana dengan membongkar ideologi dan kuasa yang tersembunyi atau disembunyikan di balik fitur-fitur lingual. Lalu tujuan kedua adalah pemunculan kesadaran yang merupakan lanjutan tujuan pertama. Setelah berhasil membongkar kuasa dan ideologi dalam penggunaan bahasa, muncullah kesadaran untuk melakukan sesuatu yang berpihak kepada yang kalah, tidak berdaya, dan terpinggirkan (Santoso, 2019). Pada akhirnya kesadaran untuk memilih dan memilah sebagai hasil dari penyadaran itu memberikan pengalaman yang berarti untuk tidak begitu saja percaya dengan konten dan konteks pencitraan dialektika para penguasa. Oleh karena itu, hubungan ini bersifat dinamis, dalam arti bahwa penulis dan pembaca memberikan pemicu untuk bisa saling memahami tulisan tersebut. Mungkin hal ini analog dengan teorinya Mukarovsky dalam Teeuw (1984) yang menyatakan bahwa karya seni terwujud sebagai tanda dalam struktur instrinsiknya, dalam hubungannya dengan kenyataan dan juga dalam hubungannya dengan masyarakat, pencipta, dan penanggapnya (*dynamic structuralism*).

Analisis wacana dalam paradigma ini menekankan pada konstelasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna. Bahasa tidak dipahami sebagai medium netral yang terletak di luar diri si pembicara. Bahasa dipahami sebagai representasi yang berperan dalam membentuk subjek tertentu, tema-tema wacana tertentu, maupun strategi-strategi yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu analisis wacana dipakai untuk membongkar kuasa yang ada dalam setiap proses bahasa, batasan-batasan apa yang diperkenankan menjadi wacana, perspektif yang mesti dipakai, dan topik apa yang dibicarakan. Wacana melihat bahasa selalu terlibat dalam hubungan kekuasaan. Oleh karena memakai perspektif kritis, analisis wacana kategori ini disebut juga dengan analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*).

Paradigma kritis pada dasarnya adalah paradigma ilmu pengetahuan yang meletakkan epistemologi kritik marxisme ke dalam seluruh metodologi penelitiannya. Fakta menunjukkan bahwa paradigma kritis yang diinspirasi dari teori kritis tidak bisa melepaskan diri dari warisan Marxisme dalam seluruh filosofi pengetahuan yang menjadi dasarnya. Teori kritis pada satu pihak merupakan salah satu aliran ilmu sosial yang berbasis pada ide-ide Karl Marx dan Engels (Denzin, 2000). Pengaruh idea marxisme-neomarxisme dan teori kritis memengaruhi filsafat pengetahuan dari paradigma kritis. Asumsi realitas yang dikemukakan oleh paradigma adalah asumsi realitas yang tidak netral, tetapi dipengaruhi dan terikat oleh nilai-nilai dan kekuatan ekonomi, politik, serta sosial. Oleh karena itu, proyek utama dari paradigma kritis adalah pembebasan nilai dominasi dari kelompok yang ditindas. Hal itu akan memengaruhi bagaimana paradigma kritis mencoba membedah realitas dalam penelitian ilmiah, termasuk di dalamnya penelitian atau analisis kritis tentang teks media sebagai wacana. Terdapat beberapa karakteristik utama pada seluruh filsafat pengetahuan paradigma kritis yang bisa dilihat secara jelas. Hal itu menjadi karakteristik yang membedakan paradigma kritis dengan paradigma lain dalam memandang objek kajian ilmiah.

Perkembangan teori kritis semakin jelas ketika Aliran Frankfurt menjadi motor penggerak teori tersebut, selain bahwa Aliran Frankfurt bersentuhan dengan perkembangan ilmu sosial kritis pada waktu itu. Aliran tersebut juga merefleksikan peran media massa sebagai wacana pada masyarakat waktu itu. Mengingat bahwa dari segi sejarah, teori aliran Frankfurt (*Die Frankfurter Schule*) merujuk pada suatu kelompok pemikir berhaluan Marxis yang terhimpun dalam kerja-kerja intelektual kritis di Institut

Penelitian Sosial (*Institut für Socialforschung*) yang berpusat di Frankfurt, Jerman (Sholahudin, 2020). Tentu saja, konteks Jerman pada waktu itu juga sangat dipengaruhi oleh sejarah Jerman pada waktu pemerintahan Adolf Hitler (Nazi).

Dalam perkembangan selanjutnya, aliran Frankfurt juga menyatakan bahwa ternyata media bisa menjadi alat pemerintah untuk mengontrol pikiran dan perilaku publik. Artinya, media bisa menjadi bagian dari *ideological state apparatus* (Littlejohn, 2002). Dalam hal tertentu, media bukan realitas yang netral dan bebas kepentingan, tapi media massa justru menjadi realitas yang rentan dikuasai oleh kelompok yang lebih dominan dan memiliki kuasa (Rogers, 1994). Asumsi dasar dalam paradigma kritis berkaitan dengan keterangan di atas adalah keyakinan bahwa ada kekuatan laten dalam masyarakat yang begitu berkuasa mengontrol proses komunikasi yang terjadi dalam masyarakat. Itu berarti paradigma kritis melihat adanya “realitas” di balik kontrol komunikasi masyarakat. Masalahnya siapa yang mempunyai kekuatan kontrol tersebut? Mengapa mengontrol? Dan ada kepentingan apa? Dengan beberapa kalimat pertanyaan itu, tampak bahwa teori kritis melihat adanya proses dominasi dan marginalisasi terhadap kelompok tertentu dalam seluruh proses komunikasi masyarakat. Hal itu menunjukkan bahwa proses penyebaran dan aktivitas komunikasi massa juga sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi dan politik masyarakat yang bersangkutan. Metode lain yang bisa dijadikan pisau bedah wacana kritis adalah analisis struktural dan jaringan semantik.

Penelitian pada media dengan analisis wacana kritis ini telah banyak dilakukan. Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian Fitriana dkk. (2019) yang juga menggunakan *framework* analisis wacana kritis. Penelitian tersebut menghasilkan temuan berupa analisis makro (ide utama), superstruktur (pola organisasi teks), serta mikro (detail bahasa), lalu membongkar ideologi dan kekuasaan yang tersembunyi di pada lima berita yang diambil dari dua media daring, yaitu kompas.com dan detik.news mengenai kasus penipuan travel umrah telah dilakukan dengan metode Teun A. Van Dijk. Penelitian lain yang relevan adalah penelitian Mulyana dan Irfan (2021) yang membahas mengenai wacana dalam program TV menjelang pemilihan presiden, menunjukkan bagaimana keberpihakan ideologis (pro-petahana, pro-penantang) dibentuk melalui teks media. Penelitian tersebut juga menggunakan *framework* analisis wacana kritis dengan metode Teun A. Van Dijk. Meskipun demikian, terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini karena objek yang diteliti adalah program televisi politik dan

membandingkan mekanisme ideologis antara media konvensional dan media digital pada masa-masa menjelang pemilihan presiden. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah penelitian yang belum berfokus pada konfrontasi keberpihakan pada komentar audiens dalam konten yang dibagikan dalam media digital dan ragam *ideological state apparatus*.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis. Data penelitian berupa komentar pembaca pada tiga berita yang dimuat di media digital Detiknews dan Detikfinance, yaitu berita berjudul (1) “KPK Respons Jokowi soal Temuan Baru di Kasus Novel: Semoga Bisa Diungkap”, (2) “Hakim MK: Bila Aset First Travel Dibalikin ke Korban Apakah Cukup?”, dan (3) “Rapat Kartu Pra Kerja, Jokowi: Bukan Menggaji Pengangguran”. Ketiga berita tersebut dipilih secara purposif berdasarkan relevansinya dengan tema konfrontasi keberpihakan dan mekanisme *ideological state apparatus* (ISA) dalam wacana media digital.

Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan mencatat dan mengklasifikasikan komentar pembaca yang muncul pada kolom komentar berita-berita tersebut. Komentar yang terkumpul kemudian dikelompokkan ke dalam tiga kategori kecenderungan, yaitu pro, kontra, dan netral terhadap pernyataan atau kebijakan yang diberitakan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan dua metode secara komplementer. Pertama, analisis wacana kritis (AWK) digunakan untuk membongkar relasi ideologi dan kekuasaan yang tersembunyi di balik fitur-fitur kebahasaan dalam komentar pembaca. Kedua, analisis struktural dan jaringan semantik (Osgood, 1952) digunakan untuk memetakan kecenderungan makna dan arah ekspresi yang terbentuk dalam komentar. Melalui dua metode tersebut, penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana konfrontasi keberpihakan terbentuk dalam ruang komentar media digital serta bagaimana mekanisme ISA bekerja dalam konteks tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Berdasarkan analisis terhadap komentar pembaca pada berita yang dimuat di media digital Detiknews dan Detikfinance, diperoleh temuan yang dirangkum dalam tabel berikut.

No	Data Judul Berita	Dominasi Komentar	Keterangan
1	“KPK Respons Jokowi soal Temuan Baru di Kasus Novel: Semoga Bisa Diungkap”	Kontra	Tidak ada komentar pro/netral
2	“Hakim MK: Bila Aset First Travel Dibalikin ke Korban Apakah Cukup?”	Seimbang (Kontra, Pro, Netral)	Isu berdimensi sakral/keagamaan
3	“Rapat Kartu Pra Kerja, Jokowi: Bukan Menggaji Pengangguran”	Kontra	Didominasi ekspresi pesimistis

**Tabel 1.** Temuan Penelitian dalam Komentar terhadap Berita

Temuan-temuan tersebut selanjutnya dibahas secara lebih mendalam dalam sub bab Pembahasan. Temuan akan dijabarkan secara lebih komprehensif dalam kaitannya dengan mekanisme *ideological state apparatus* dan dinamika konfrontasi keberpihakan dalam wacana media digital.

## Pembahasan

### Komentar Pembaca pada Setiap Pernyataan/Proposisi dari Jokowi, Anies Baswedan, dan Kasus First Travel

Jokowi menjadi sosok yang sangat diidolakan dan dihormati pada awal kemunculannya. Akan tetapi, sejak periode pertama jabatannya sebagai presiden, Jokowi menjadi sosok yang tidak disukai. Hal itu terjadi karena media mem-*blow up* berbagai isu sensitif yang menyangkut kasus Novel Baswedan. Hal itu semakin diperparah dengan adanya Undang-Undang baru KPK yang kontroversial. Kecenderungan komentar kontra sangat dominan. Sangat mungkin pihak yang memberikan komentar itu tidak mengetahui persis hubungan proposisi dan konten tetapi kekuasaan media menjadi pemicu adanya sentimen kepada seseorang. Kata-kata “orang ini” dan panggilan “Bos” yang tidak wajar memberikan konotasi mensubordinatkan presiden Jokowi. Komentar-komentar seperti “gak respek”, “berarti memerlukan proses awal lagi”, dan “jangan putar-putar” merupakan ekspresi kekecewaan dan pesimis tentang sesuatu hal.

Hal itu menunjukkan bahwa media bukan realitas yang netral dan bebas kepentingan, tapi media massa justru menjadi realitas yang rentan dikuasai oleh kelompok yang lebih dominan dan berkuasa (Rogers, 1994). Tentu saja, kelompok ini tidak harus kelompok elit,

kelompok marginal pun akan bisa menjadi dominan. Di sisi lain, pihak pemerintah akan memberikan ekspresi konternya yang menetralisasi dan mendegradasi tekanan sosial. Hal itu juga disebut sebagai *ideological state apparatus*. Fenomena tersebut dapat dilihat lebih detail pada paparan di bawah ini.

**Data 1**

<b>Kontra</b>	<b>Pro</b>	<b>Netral</b>
<i>Jujur saja saya sudah enggak respek orang ini sedikitpun.</i>	-	-
<i>Karena baru, berarti memerlukan proses awal lagi, Bos!</i>	-	-
<i>Sudah jangan putar-putar; hanya ada ketegasan sikap &amp; ditindak! Apabila tidak ya GANTI sesegera mungkin. TIDAK ada tempo atau waktu lagi! SEGERA UNGKAP</i>	-	-

**Tabel 2.** Ujaran dalam Berita Detiknews Edisi Selasa, 10 Desember 2019, 14:52 WIB Berjudul “KPK Respons Jokowi soal Temuan Baru di Kasus Novel: Semoga Bisa Diungkap”

**Komentar Pembaca pada Berita Berjudul “Hakim MK: Bila Aset First Travel Dibalikin ke Korban Apakah Cukup?”**

Masalah kasus First Travel sudah bergulir sekian tahun, tetapi memiliki fokus pemberitaan yang sangat fluktuatif. Terakhir menjadi viral karena penyitaan harta First Travel yang dianggap tidak adil. Hal itu disebabkan pelimpahan harta sitaan diberikan kepada negara, bukan dikembalikan kepada para korbannya. Pernyataan hakim MK yang memberikan rasionalisasi terhadap keputusan itu. Pertimbangannya adalah kuantitatif, yaitu besaran nominal yang diragukan akan membawa keadilan bagi para korban dan kecukupannya. Namun para korban mencoba untuk membuat opini bahwa tidak adil jika harta sitaan diberikan pada negara yang seharusnya membantu, tetapi malahan mengambil. Foucault (2013) menyatakan bahwa mereka dengan badan aturan yang memungkinkan

mereka untuk membentuk objek wacana dan dengan demikian membentuk kondisi historis mereka.

Dalam hal ini, badan aturan diartikan sebagai pembentukan wacana dominan, atau teks-teks yang wewenangnya memungkinkan pengesahannya sebagai pengetahuan, kebenaran, hukum abadi, atau “akal sehat”. Tujuannya adalah agar tekanan semakin keras. Sayangnya, karena permasalahan ini berhubungan dengan ibadah/ritual keagamaan, maka kecenderungan komentar netral dan pro menjadi seimbang. Hidup berserah pada sang pencipta masih menjadi poin yang dipertimbangkan. Komentar yang mengarah kepada ketidakrelaan misalnya pada kutipan bernada kejengkelan berikut. *“Kalau yang kasih subsidi penghasilannya setaraf menteri... Ini yang dirugikan First Travel penghasilannya kebanyakan menengah ke bawah”, “Masa mau disita buat negara!”, “Bukan malah dimaling lagi”.* Sedangkan, pendapat yang pro mencoba untuk memberikan pencerahan logika, dan komentar yang netral cenderung lebih pasrah seperti pada kutipan, *“Saran saya ikhlaskan, dan uangnya disumbangkan”, “Karena enggak butuh uangnya kembali tapi berangkat ke tanah suci”.*

Di sisi lain, biasanya pihak pemerintah akan memberikan ekspresi konteranya yang menetralisasi dan mendegradasi tekanan sosial dengan menugaskan Menteri Agama (Menag) untuk memberikan harapan akan mencari jalan keluar yang terbaik. Jika dilihat dari perkembangan komentar sebelum dan sesudah pernyataan Menag, akan berbeda isu yang di-*blow up*. Hal ini juga disebut sebagai *ideological state apparatus* dengan detail paparan data berikut.

#### Data 2

Kontra	Pro	Netral
<i>Terus kalau disita negara... negara disubsidi lagi oleh rakyat. Kalau yang kasih subsidi penghasilannya setaraf menteri... Ini yang dirugikan First Travel penghasilannya kebanyakan menengah ke bawah. Pro kontra selalu ada.</i>	<i>Maksudnya hakim MK kalau ternyata asetnya setelah dihitung dan dibagi jumlah korban ternyata dapatnya sangat kecil, contoh kasarnya 100 ribu Rupiah per korban. Apakah korban bisa terima? Jangan minta</i>	<i>Kalau boleh saran... Aset lebih baik diambil pemerintah... Dengan syarat pemerintah memberangkatkan jamaah yang sudah membayar di First Travel... Saran saya seperti... Karena enggak butuh uangnya kembali...</i>

	<i>APBN yang tanggung kerugiannya.</i>	<i>Tapi berangkat ke Tanah Suci.</i>
<i>Memang sudah seharusnya dikembalikan ke pihak yang berhak berapapun jumlahnya dalam hal ini korban.</i>	<i>Maksudnya Pak Hakim itu, data korbannya apa ada lengkap, kalau sudah ada bagaimana pembagiannya, apa siap kalau ternyata uangnya enggak cukup, jamaah yang lain apa mau digitukan, sudah ada sepakat tentang hal itu? Jangan sampai nanti malah timbul masalah baru.</i>	<i>Marilah menjadi dewasa dalam menyikapi sesuatu hal. Kalau ada berita baca yang lengkap baru komentar. Jangan mendahulukan emosi dari sudut pandang yang sempit. Pahami semuanya dulu baru berpendapat. Semoga damai bangsa ini.</i>
<i>Ini bukan cukup enggak cukup, tapi siapa yang berhak menerimanya. Bukan malah dimaling lagi. Anda waras kan, Pak...</i>		<i>Saran saya ikhlaskan, dan uangnya disumbangkan misal membangun masjid atau lainnya... Insyaa Allah pahala mengalir terus walau sudah meninggal... Kalau untuk negara jangan rela yaa dan enggak ada hak negara makan uang jamaah.</i>

**Tabel 3.** Ujaran dalam Berita Detiknews Selasa, 10 Desember 2019, 14:52 WIB Berjudul “Hakim MK: Bila Aset First Travel Dibalikin ke Korban Apakah Cukup?”

### **Komentar Pembaca pada Berita Berjudul “Rapat Kartu Pra Kerja, Jokowi: Bukan Menggaji Pengangguran”**

Komentar pada kasus di atas adalah keberpihakan media terhadap keterpurukan orang-orang marjinal karena ketidakmampuan manajemen pemerintah. Berbagai janji penguasa yang berhubungan dan menyentuh kehidupan rakyat, khususnya rakyat yang terpinggirkan akan menjadi trending topik. Berita tentang Kartu Pra Kerja dianggap isapan jempol karena berkontradiksi dengan kenaikan iuran BPJS. Masalah krusial pada dua hal,

yaitu kesehatan dan pendidikan sangat sensitif. Pada saat media dan masyarakat sampai pada tujuan kedua pada analisis wacana kritis, maka akan terbangun kesadaran untuk berpihak pada kaum pinggiran, kaum marjinal, atau korban (Santoso, 2019). Hal tersebut dapat dilihat lebih lanjut pada kutipan data berikut yang menunjukkan harapan besar bahwa peluang bekerja dan mendapat kemudahan dari Kartu Pra Kerja belum terwujud. Komentar *“Rezimnya pakdhe nii ora pinter golek dhuwit yaa mas bro... JADI semua masih nampak lesu, terimaan pajakpun sy kira akan turun?”* menunjukkan kekecewaan terhadap manajemen pemerintah tentang pajak yang berakibat kenaikan BPJS dan sulitnya mencari pekerjaan sehingga pengangguran masih melimpah. Hal yang sama juga terdapat pada komentar, *“Coba pak puter lagi janji Anda di kamp yg dulu ngomong apa...biar ga ngelak terus”*. Sedangkan, komentar *“Pemerintah pola pikirnya gimana y kadang saya ga ngerti satu sisi dia bayar orang yg blom kerja sisi lain dia naikan bpjs 100% pa bpjs saja masih ngutang ke rumah sakit blom dibayar sampai saat ini sekarang uang yg ada malah mau gaji pengangguran, apa ga mikir ????”* menunjukkan rasionalisasi gaya marjinal sebagai ungkapan kebijakan pemerintah yang sering kontradiktif.

Dengan analisis struktural dan jaringan semantik (Osgood, 1952), komentar-komentar tersebut memberikan gambaran yang jelas tentang kecenderungan degradasi dan nonapresiatif terhadap pemerintah. Komentar *“Hee.. orang bilang banyak janji banyak lupa, tidak berjanji tidak lupa?! SAYANGNYA Rezimnya pakdhe nii ora pinter golek dhuwit yaa mas bro.. JADI semua masih nampak lesu, terimaan pajakpun sy kira akan turun?”* menunjukkan struktur yang tegas dengan terdapat pendahuluan kata “hee...” untuk mengungkapkan “warning” dan pengulangan kata “banyak”. Jaringan semantik dikembangkan dengan cara menggunakan kata “sayangnya” dan “jadi” sebagai kata yang bermakna ironis dan kesimpulan pembenaran terhadap komentar penulis.

Pernyataan “Kartu Pra Kerja, Jokowi: Bukan Menggaji Pengangguran” merupakan upaya pemerintah memberikan penjelasan dan penguatan terhadap komentar sentimen yang menyatakan bahwa pengangguran digaji. Masyarakat pesimis dengan kemampuan keuangan pemerintah. Hal itu terjadi karena Kartu Pra Kerja jadi andalan pada saat kampanye presiden. Untuk meyakinkan, maka pemerintah membuat pernyataan-pernyataan yang memojokkannya dengan harapan-harapan optimis. Kondisi dialektika seperti ini juga sebagai upaya membangun *ideological state apparatus*.

### Data 3

Kontra	Pro	Netral
Hee.. orang bilang banyak janji banyak lupa, tidak berjanji tidak lupa?! SAYANGNYA Rezimnya pakdhe nii ora pinter golek dhuwit yaa mas bro.. JADI semua masih nampak lesu, terimaan pajakpun sy kira akan turun?	-	-
Coba pak puter lagi janji anda di kamp yg dulu ngomong apa...biar ga ngelak terus .		
Pemerintah pola pikirnya gimana y kadang saya ga ngerti satu sisi dia bayar orang yg blom kerja sisi lain dia naikan bpjs 100% pa bpjs saja masih ngutang ke rumah sakit blom dibayar sampai saat ini sekarang uang yg ada malah mau gaji pengangguran, apa ga mikir ????		

**Tabel 4.** Ujaran dalam Berita Detikfinance Selasa, 10 Desember 2019, 14:52 WIB

Berjudul “Rapat Kartu Pra Kerja, Jokowi: Bukan Menggaji Pengangguran”

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. (1) Hubungan proposisi dan konten pada komentar mampu membangun gambaran tentang

kecenderungan kontra, pro, dan netral. Pada saat berita itu cenderung mendeskreditkan kelompok marjinal, maka komentar kontra menjadi dominan, begitu pula sebaliknya. (2) Jika berita yang dimuat berhubungan dengan masalah yang bersifat sakral, maka komentar yang muncul akan lebih seimbang antara yang kontra, pro, dan netral, dengan nada yang lebih mengarah pada kepasrahan terhadap Tuhan. (3) Jika berita itu menggambarkan kebijakan pemerintah atau janji saat kampanye, maka komentar yang muncul cenderung memberikan sikap pesimistis jika terdapat kontradiksi kebijakan. (4) Pada setiap isu sensitif yang muncul dalam berita, ragam upaya penguasaan informasi selalu dilakukan oleh pihak pemerintah, dengan istilah lain adalah *ideological state apparatus*.

## DAFTAR RUJUKAN

- Birgili, B. (2015). Creative and critical thinking skills in problem-based learning environments. *Journal of Gifted Education and Creativity*, 2(2), 71–80.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2000). *Handbook of qualitative research*, 2<sup>nd</sup> edition. Sage Publication.
- Foucault, M. (2013). *Archaeology of knowledge*. Routledge.
- Littlejohn, S. W. (2002). *Theories of human communication (7th ed.)*. Wadsworth.
- Locke, T. (2004). *Critical discourse analysis*. Cromwell Press.
- Miles, S. (2004). *Discourse*. Routledge.
- Osgood, C. E. (1952). The nature and measurement of meaning. *Psychological Bulletin*, 49(3), 197–237.
- Rogers, E. M. (1994). *The diffusion of innovations (4th ed.)*. Free Press.
- Santoso, A. (2019). *Panorama studi wacana kritis: relasi antara wacana publik, ideologi, dan kesadaran berbahasa kritis*. Universitas Negeri Malang.
- Fitriana, R. A., Gani, E., & Ramadhan, S. (2019). Analisis wacana kritis berita online kasus penipuan travel umrah (model Teun A. Van Dijk). *BASINDO: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra Indonesia, dan Pembelajarannya*, 3(1), 44–54.
- Mulyana, A. P., & Irfan, M. (2021). Bentuk pertarungan wacana ideologi media massa menjelang pemilihan presiden. *Jurnal Akrab Juara*, 6(2), 326–340.
- Sholahudin, U. (2020). Membedah teori kritis mazhab Frankfurt: sejarah, asumsi, dan kontribusinya terhadap perkembangan teori ilmu sosial. *UWKS: Journal of Urban Sociology*, 3(2), 71–89.
- Teeuw, A. (1984). *Sastra dan ilmu sastra: pengantar teori sastra*. Pustaka Jaya.
- Verma, R. G. (2013). Locating reader response theory in Jaus's: Literary history as a challenge to literary theory. *Language in India*, 13(5), 258–269.
- Weiss, G., & Wodak, R. (2007). *Critical discourse analysis theory and interdisciplinarity*. Palgrave Macmillan Ltd.